



Jateng
gayeng



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renja ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kerja keras dari semua pihak terutama dari unsur pimpinan dan staf yang ada di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renja ini dapat selesai disusun. Renja ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Renja ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan Tahun 2022 serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renja ini. Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renja dan RKPD Tahun 2022 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda


NIP. 19681124 199310 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program kegiatan Tahun 2022, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2022, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah.

Semarang, Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

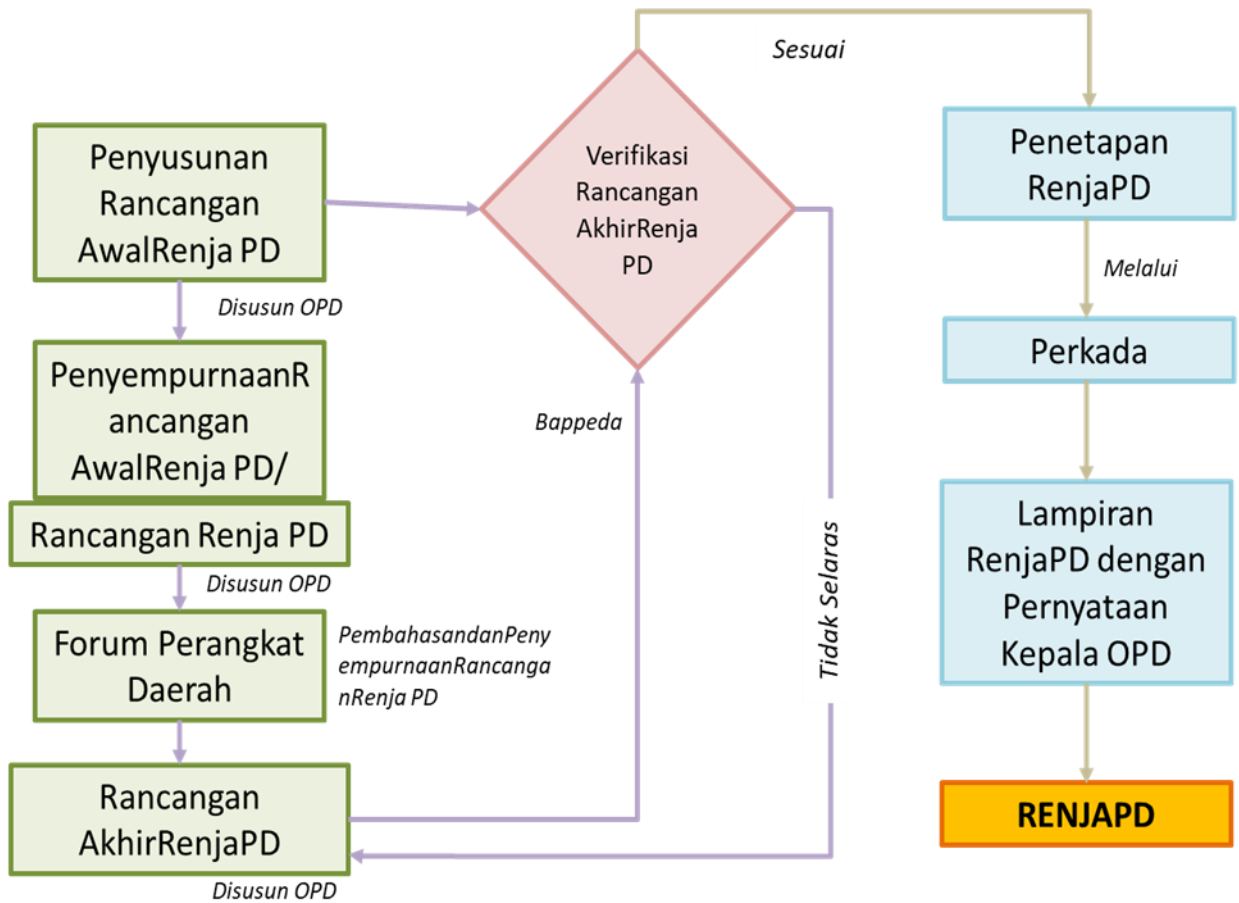
1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.)
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutahiran Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Povinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);

38. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 95);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan
			Program perlindungan Khusus Anak
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana
		Program Keluarga Sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2													
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2	02												
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2	02	15			30	30	30	100	30	100			
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	- Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	91,43	88,57	88,57	88,57	100	100	100	100			
		- Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya	100	83,33	83,33	83,33	100	100	100	100			
		- Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia											
2	02	15	001	Pemberdayaan Perempuan	1) Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	350	30	25	30	120	120	1767	1472,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		2) Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	43.500	3.389	3.450	3.389	98,23	1.200	942	78,5			
2	02	15	002	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	1)Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	73	35	35	35	100	73	48	65.75
					2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
2	02	15	003	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	1) Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	32	31	29	31	106,9	35	35	100
					2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2	02	15	004	Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	36	35	34	35	102,94	35	35	100
2	02	15	005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5	10	5	10	200	5	5	100
					Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20	20	20	20	100	20	5	25
					Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	30	30	30	30	100	30	15	50
2	02	15	006	Penyusunan data dan informasi PPA	Jumlah laporan data dan informasi PPA	6	5	5	5	100	6	7	116,67
2	02	16		Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000	5,75 per 100.000	5,81 per 100.000	5,75 per 100.000	101,04	5,76 per 100.000	1,18 per 100.000	488,14
					Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	12,15 per 100.000	12,66 per 100.000	12,15 per 100.000	104,2	12,44 per 100.000	7,09 per 100.000	175,46
2	02	16	001	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	967	980	997	980	101,73	987	587	170,76
2	02	16	002	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1.158	1.074	1.188	1.074	110,61	1.178	597	197,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2	02	16	003	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100	100	100	100	100	100		
2	02	16	004	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8	16	8	16	200	8	100	
2	02	16	005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15	15	15	15	100	15	100	
2	02	16	006	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
2				Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2	08	15		Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	41,67	6,33	8,33	6,33	75,99	11,42	17,14	150,11
					Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30,00	28,69	28,15	28,69	101,92	26,39	29,21	110,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Unmetneed KB	10,75	12,9	13,1	12,9	101,55	12,66	12,89	98,22			
		Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	08	15	001	Peningkatan kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	1.443.023	1.364.801	1.370.872	1.364.801	99,56	1.394.922	1.202.129	86,18
2	08	15	002	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	3	2	3	2	66,67	3	4	133,33
					Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	35	5	5	5	100	35	70	200
2	08	15	003	Pemetaan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	10	1	1	1	100	2	2	100
2	08	15	004	Penyediaan profil kependudukan dan KB	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	5	1	1	1	100	1	0	0
2	08	15	005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	701.746	845.979	998.000	845.979	117,97	767.025	723.990	105,94
2	08	15	006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	20	30	20	30	150	20	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2	08	16		Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok tribina yang aktif	96,30	99.01	93	99.01	106,46	85,57	98,55	115,17
					Persentase UPPKS yang aktif	90,20	96,59	88	96,59	109,76	68,25	98,02	143,62
					Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	100	40	40	40	100	60	40	66,67
2	08	16	002	Advokasi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26.779	24.348	22.879	24.348	106,42	26.751	23.784	88,91
2	08	16	003	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10	4	4	4	100	6	0	0
2	08	16	004	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15.456	10.734	10.514	10.734	102,09	15.422	9.732,99	63,11
2				Non Urusan		-	-	-	-	-			
2	02			Eks BAU									
2	02	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90	90	90	90	100	90	90	100
2	02	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	20	4	4	4	100	4	4	100
2	02	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah bulan	60	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah										
2	02	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor	60	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		dan Rumah Tangga Perangkat Daerah											
2	02	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	50	10	10	10	100	10	10	100
2	02	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	4	0	0	0	0	1	0	0
2	02	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	500	102	102	102	100	100	0	0
2	02	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek /Seminar	100	20	20	20	100	20	20	100
2	02	01	016	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
2	02	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100	100	100	100
2	02	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	1	1	1	100	1	1	100
2	02	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			30	30	30	-	30	30	30	-	
2	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang bidang pembangunan			-	-	6,42	6,84	-	-	6,42	6,84	
3	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan dan sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi			-	-	30	40	-	-	30	40	
4	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender			-	-	35	40	-	-	35	40	
5	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak			-	-	35	40	-	-	35	40	
6	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya			88,57	91,43	94,28	100	88,57	91,43	94,28	100	
7	Persentase Kabupaten/kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama			-	-	94,28	100	-	-	94,28	100	
8	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia			83,33	100	100	-	83,33	100	100		
9	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi			-	-	15	20	-	-	15	20	
10	Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring			-	-	15	20	-	-	15	20	
11	Persentase kabupaten/kota yang sudah			-	-	15	20	-	-	15	20	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejang											
12	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			25	80	-	-	30	80	-	-	
13	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik			3450	5700	-	-	3389	1200	-	-	
14	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			35	73	-	-	35	73	-	-	
15	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani			100	100	-	-	100	100	-	-	
16	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya			29	30	35	35	31	35	35	35	
17	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani			100	100	-	-	100	100	-	-	
18	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan			34	35	35	35	35	35	35	35	
19	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan			5	5	10	20	10	5	10	20	
20	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan			20	20	10	15	20	20	10	15	
21	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan			30	30	30	35	30	30	30	35	
22	Jumlah laporan data dan informasi PPA			5	6	-	-	5	7	-	-	
23	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			5,81	5,76	5,7	5,64	5,75	5,76	5,7	5,64	
24	Rasio korban kekerasan terhadap anak			12,66	12,44	12,46	12,36	12,15	12,44	12,46	12,36	
25	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan			997	987	-	-	980	987	-	-	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dewasa											
26	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak			1.188	1.178	-	-	1074	1.178	-	-	
27	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	
28	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			8	8	8	8	16	8	8	8	
29	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			15	15	15	15	15	15	15	15	
30	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	
	URUSAN DALDUK KB											
31	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk			8,33	11,42	33,33	-	6,33	11,42	11,42	-	
32	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)			-	-	25	35	-	-	25	35	
33	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			28,15	26,39	29,5	30	28,69	26,39	26,39	30	
34	Unmetneed KB			13,1	12,66	12,89	12,76	12,9	12,66	12,66	12,76	
35	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif			100	100	100	-	100	100	100	-	
36	Jumlah Peserta KB MKJP			1.370.872	1.394.922	8.256.000	9.534.000	1.364.801	1.394.922	1.394.922	9.534.000	
37	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan			-	-	19,44	27,7	-	-	19,44	27,7	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kependudukan) 5 Bidang											
38	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun			3	3	-	-	2	3	3	-	
39	Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk			5	35	-	-	5	35	35	-	
40	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi			1	2	-	-	1	2	2	-	
41	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan			1	1	-	-	1	1	1	-	
42	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB			998.00 0	767.02 5	-	-	845.97 9	767.025	767.02 5	-	
43	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB			20	20	-	-	30	20	20	-	
44	Indeks Pembangunan Keluarga			-	-	96,25	96,3	-	-	96,25	96,3	
45	Persentase kelompok tribina yang aktif			93	85,57	96,25	96,3	99,01	85,57	85,57	96,3	
46	Persentase UPPKS yang aktif			88	68,25	90,5	91	96,59	68,25	68,25	91	
47	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga			40	60	80	-	40	60	60	-	
48	Jumlah kelompok Tribina yang aktif			22.897	26.751	26.765	26.779	24.348	26.751	26.751	26.779	
49	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga			4	6	-	-	4	6	6	-	
50	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif			10.514	15.422	15.439	15.456	10.734	15.422	15.422	15.456	
	EKS BAU											
51	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	90	90	90	90	90	90	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			4	4	4	4	4	4	4	4	
53	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
54	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
55	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
56	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
57	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
58	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
59	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
60	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
61	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
62	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			10	10	10	10	10	10	10	10	
63	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi			0	1	5	1		1	1	1	
64	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			102	100	100	100	102	100	100	100	
65	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar			20	20	25	25	20	20	20	25	
66	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
67	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
68	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat			2	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah yang disusun											
69	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan yang integratif. Kemudian hal tersebut dikomunikasikan dengan Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di kabupaten/kota telah ditampung dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota dengan tetap bersinergi pada capaian target indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat kabupaten/kota sendiri.

Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan sinergitas yang optimal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan nasional. Pengintegrasian lima arahan Presiden Republik Indonesia antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pencegahan Perkawinan Anak telah dimasukkan dalam program dan kegiatan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan arahan Presiden terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, sehingga masih perlu pengembangan kapasitas;

3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan semaksimal mungkin. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Belum optimalnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi;
 - b. Masih rendahnya akses sumberdaya ekonomi bagi perempuan.
 - c. Rendahnya implementasi kebijakan PUG di perangkat daerah provinsi;
 - d. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kekerasan fisik dan kekerasan seksual;
 - e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
 - g. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan.
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - a. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan;
 - b. Masih sedikitnya kabupaten/kota yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
 - c. Rendahnya komitmen Kepala Daerah untuk memprioritaskan GDPK sebagai acuan Pembangunan Kependudukan di daerah.
 - d. Menurunnya kesertaan KB aktif;
 - e. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
 - f. Belum optimalnya peran aktif kelompok Tribina dalam meningkatkan ketahanan keluarga;

- g. Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam meningkatkan ketahanan keluarga;

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - b. Kewajiban perangkat daerah Provinsi untuk membuat GAP dan GBS untuk mengimplementasikan PUG dalam program dan kegiatan perangkat daerah;
 - c. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. Koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak (OPD, Rumah Sakit, NGO, dan APH);
 - e. Adanya kerjasama atau MOU antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
 - f. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
 - g. Adanya dukungan dari unsur pentahelix dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - h. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
 - i. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
 - b. Adanya kewajiban menyusun Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);

- c. Komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk;
- d. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- e. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain:

1. Kesenjangan gender

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Selain itu juga, pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan masih dibawah pengeluaran perkapita laki-laki.

2. Pemenuhan Hak Anak

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan pada tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten/kota atau 100% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 35 kabupaten/kota tersebut, hanya 1 (satu) yang mendapat kategori utama, sedangkan untuk kategori nindya dan madya sebanyak 60% dan kategori pratama sebanyak 37%.

Beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat kategori terendah dikarenakan belum terpenuhinya keterisian indikator terkait kebijakan pemenuhan hak anak dan tenaga layanan seperti sekolah ramah anak, puskesmas layak anak serta pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemenuhan hak anak seperti pentingnya desa/kelurahan ramah anak masih rendah sehingga perlu didorong pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak sampai dengan bulan September tahun 2021 sebanyak 1.597 korban yang terdiri korban kekerasan perempuan sebanyak 755 orang dan korban kekerasan anak sebanyak 842 orang. Kondisi Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya.

4. Kesertaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta KB MKJP sampai dengan TW II tahun 2021 sebanyak 1.387.443 orang mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebanyak 1.364.801 orang. Prosentase Penggunaan KB MKJP pada Tahun 2020 sebesar 28,69% kemudian capaian sampai dengan TW III tahun 2021 sebesar 29,21% atau mengalami peningkatan. Adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmet need) tahun 2020 sebesar 12,86%, sampai dengan TW III sebesar 12,89% mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB karena kondisi pandemi covid-19 dan peran lembaga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dirasakan belum maksimal.

5. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Jumlah kelompok tribina yang aktif sampai dengan TW III Tahun 2021 sebanyak 23.784 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebanyak 24.150 kelompok. Keaktifan kelompok Tribina yang aktif sampai dengan TW III tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 sebesar 99,10 % sedangkan capaian sampai dengan TW III tahun 2021 sebesar 98,55% capaian tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85,57%. Adapun kelompok UPPKS yang aktif sampai dengan TW III Tahun 2021 sebanyak 9.732 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebanyak 10.320 kelompok. Prosentase kelompok UPPKS pada tahun 2021 sebesar 98,02% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 96,15%. Adanya pandemi Covid19 ini menyebabkan banyak pembatasan

kegiatan masyarakat sehingga menyebabkan menurunnya jumlah kelompok tribina yang aktif dan kelompok UPPKS.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp.000)	Program	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.865.097.000					11.865.097.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%	11.468.959.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	90%	11.468.959.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	396.138.000		Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	396.138.000	
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,42 per 100.000	3.053.400.000	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6,42 per 100.000	3.053.400.000	
3	Perlindungan Perempuan				1.021.800.000					1.021.800.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,7 per 100.000	721.800.000	Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000; 12.66.Per 100.000	721.800.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejang	15%	300.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejang	15%	300.000.000	

4	Peningkatan Kualitas Keluarga				175.000.000					175.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	35%	50.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga	Semarang dan luar Semarang	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	35%	50.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase layanan konsultasi keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak	42,85%	125.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase layanan konsultasi keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak	42,85%	125.000.000	
5	Pemenuhan Hak anak (PHA)				235.000.000					235.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a menuju layak anak minimal tingkat pratama	94,28%	150.000.000	Pemenuhan Hak anak (PHA)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a menuju layak anak minimal tingkat pratama	94,28%	150.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator kabupaten/kot a layak anak (KLA)	20%	85.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator kabupaten/kot a layak anak (KLA)	20%	85.000.000	
6	Perlindungan Khusus Anak				695.000.000					695.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,46 per 100.000	645.000.000	Perlindungan Khusus Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,46 per 100.000	645.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a yang sudah melaksanakan pendataan	15%	50.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kot a yang sudah melaksanakan pendataan	15%	50.000.000	

			kekerasan secara berjejar					kekerasan secara berjejar			
7	Pengendalian Penduduk				275.000.000					275.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 bidang	19,44%	225.000.000	Pengendalian Penduduk	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 bidang	19,44%	225.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	25%	50.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	25%	50.000.000	
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.150.000.000					1.150.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	29,5%	1.100.000.000	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	29,5%	1.100.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Unmetneed KB	12,89%	50.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Unmetneed KB	12,89%	50.000.000	
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				340.000.000					340.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	96,25%	150.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	96,25%	150.000.000	

		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok UPPKS yang aktif melaporkan	90,5%	150.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok UPPKS yang aktif melaporkan	90,5%	150.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kab/kota	25%	40.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kab/kota	25%	40.000.000	
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator oleh Kab/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	15%	150.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase keterisian indikator oleh Kab/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	15%	150.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PPPA					
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	40%	
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	30%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	8,333%	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	
3	Kegiatan Penguatan dan	Provinsi	- Jumlah lembaga	8	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	penyedia layanan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya. - Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	kelompok 10 kelompok	
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan konsultasi keluarga yang responsif gender	40%	
2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	42,85%	
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 Kab/kota	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	10 kelompok	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	8,333%	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	- Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar. - Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan	100% 10 kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			perlindungan khusus		
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya. - Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	15 kelompok 10 kelompok	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	5 kab/kota	
URUSAN DALDUK KB					
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
1	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah peserta KB Aktif	8.256.000 Orang	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.	Provinsi Jawa Tengah	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB.	11,7 %	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
1	Kegiatan Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Provinsi Jawa	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun	7 kab/kota	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tengah	GDPK		
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7 dokumen	
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
1	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kelompok tribina yang aktif	26.765 kelompok	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif. - Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	15.439 kelompok 30%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dokumen	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 laporan	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 laporan	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 laporan	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah		
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan dokumen Renja Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Permen No 2-2020 Renstra KPPPA Tahun 2020-2024 yang bertujuan :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam table berikut.

Tabel 3.1.

**Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		1. Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%	34,27

			2. Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	91.43
			3. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.15
2.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		1. Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.20
		Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	1. Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG	%	80
			2. Persentase kab/kota yang terapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.05
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	64.76
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	54.38

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah tahun 2022 dan sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Telah tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan rumusan program dan kegiatan disusun guna mendukung capaian visi pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi yang dilaksanakan antara lain :

1. Misi ke - 3, yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Misi ini bertujuan untuk : **1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan.** Sasaran yang ingin dicapai adalah: **1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga miskin pada dua desil terbawah;** 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
2. Misi ke - 4, yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan; Misi ini bertujuan untuk : **1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);** 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; **3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;** 4) meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Rumusan program dan kegiatan tahun 2022 juga mempertimbangkan untuk mendukung pencapaian SDG's dengan indikator antara lain :

1. Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan;
2. Persentase Kab/Kota menuju layak anak strata minimal tingkat pertama;
3. Persentase keterisian indikator oleh kab/kota dan OPD Provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA Provinsi Jawa Tengah);

4. Persentase kab/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan secara berjejing;
5. Persentase keterisian indikator KLA;
6. Persentase Kab/Kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR);
7. Persentase keterisian indikator indeks pembangunan keluarga di Kab/Kota;
8. Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga;
9. Rasio korban kekerasan terhadap perempuan;
10. Rasio korban kekerasan terhadap anak;
11. Persentase Pemda yang Menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 bidang;
12. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP);
13. Unmeetneed KB;
14. Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan;
15. Persentase UPPKS yang aktif melaporkan kegiatan.

Program dan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dalam prioritas pembangunan melalui penyediaan *basic life access* (klaster 1) dan penguatan *sustainable livelihood*.

Pengembangan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah/lokal setempat menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan utamanya untuk pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 mencakup 9 program dan 27 kegiatan, yang terdiri 2 program guna mendukung urusan PPPA dan Dalduk KB, 1 program dan 8 kegiatan guna mendukung urusan Penunjang Pemerintah Daerah).

Lokasi program dan kegiatan tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan alokasi yang terlebih pada 15 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan

kelompok sasaran kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 18.960.297.000,-; dengan rincian pagu indikatif pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 5.420.200.000,-; pagu indikatif pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 1.675.000.000,-; dan pagu indikatif pada urusan Penunjang Pemerintah daerah sebesar Rp 11.865.097.000,-.

Program dan kegiatan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.2**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				11.865.097.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.865.097.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		396.138.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	196.138.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.938.497.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.508.497.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.000.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		536.462.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.462.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	150.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.000.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
			Pengadaan Mebel	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.507.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.002.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		382.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.000.000
			Pemeliharaan Mebel	10.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.330.200.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			3.053.400.000
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		205.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	40.990.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	118.010.000
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	46.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		2.848.400.000
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	443.100.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.405.300.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.021.800.000
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		155.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	40.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	115.000.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		415.000.000
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	215.000.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		451.800.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50.000.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	51.800.000
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	50.000.000
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			175.000.000
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		50.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		125.000.000
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			150.000.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		150.000.000
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	150.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			235.000.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		150.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50.000.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		85.000.000
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	50.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			695.000.000
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	40.000.000
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		426.600.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	200.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	215.000.000
			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11.600.000
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		178.400.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	88.400.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	40.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.765.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			275.000.000
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		225.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	75.000.000
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	100.000.000
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	50.000.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		50.000.000
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	50.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.150.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.100.000.000
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	400.000.000
			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	700.000.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		50.000.000
			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN			340.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		150.000.000
			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	150.000.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		190.000.000
			Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	150.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	40.000.000
JUMLAH KESELURUHAN				18.960.297.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan RKPD Tahun 2022 yang menyebutkan

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pembangunan sebesar 6,42 per 100.000.

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,7 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejaring sebesar 15%.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Gender sebesar 35%; Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis Pemenuhan Hak Anak sebesar 35%.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Keterisian Indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi sebesar 15%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama sebesar 94,28%; Persentase Keterisian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebesar 20%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak sebesar 12,46 per 100.000; Persentase Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pendataan Kekerasan secara Berjejaring sebesar 15%.

g. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemerintah daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang sebesar 19,44%; Persentase Kabupaten/Kota dalam Pendataan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) sebesar 25%.

h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 29,5%; Unmeetneed KB sebesar 12,89%.

i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase UPPKS yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 90,5%; Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Melaporkan Kegiatan sebesar 96,25%; Persentase Keterisian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota sebesar 25%.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100%; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah sebesar 90%.

Adapun Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1 adapun Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI JAWA TENGAH

Nama PD: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak									5,330,200,000		5,669,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72.62			72.7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Dan Keluarga Berencana	
						Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%	34.27		34.3		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	%	91.43		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.15		8.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan								3,613,400,000		3,795,000,000		
						Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60	510,000,000	62.85	645,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						125,000,000		150,000,000		
						Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	35	125,000,000	40	150,000,000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang					125,000,000		150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota									
						Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%	42.85	125,000,000	48.57	150,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.01			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan				125,000,000		150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	Kelompok	5	125,000,000	7	150,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						150,000,000		200,000,000		
						Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD	%	15	150,000,000	20	200,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi							
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					150,000,000		200,000,000		
						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kabupaten/Kota	5	150,000,000	7	200,000,000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.05.1.01.01			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				150,000,000		200,000,000		
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	6	150,000,000	6	200,000,000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						235,000,000		295,000,000		
						Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	94.28	150,000,000	100	205,000,000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.06.1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia					150,000,000		205,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Usaha Kewenangan Provinsi									
						Jumlah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kabupaten/Kota	35	150,000,000	35	205,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				100,000,000		150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Orang	35	100,000,000	35	150,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.06. 1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50,000,000		55,000,000		
						Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	Kelompok	35	50,000,000	35	55,000,000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	20	85,000,000	25	90,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					85,000,000		90,000,000		
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan	Kelompok	10	85,000,000	15	90,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						an dalam KIE							
		2.08.06. 1.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan	Orang	30	50,000,000	35	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi							
		2.08.06.1.02.04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				35,000,000		40,000,000		
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	Kelompok	10	35,000,000	10	40,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						rangka peningkatan kualitas hidup anak							
							%	80	3,103,400,000	90	3,150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						3,053,400,000		3,100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6.42	3,053,400,000	6.84	3,100,000,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.02.1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					205,000,000		230,000,000		
						Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%	40	205,000,000	60	230,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				-		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kewenangan Provinsi								
						Jumlah peserta perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Orang	25	-	30	50,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.08.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				40,990,000		50,000,000		
						Jumlah peserta sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenanga	Orang	50	40,990,000	60	50,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						n Provinsi							--> KOTA SEMARANG
		2.08.02.1.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi				118,010,000		80,000,000		
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kegiatan	1	118,010,000	2	80,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.02.1.01.04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG				46,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					termasuk PPRG Kewenangan Provinsi								
						Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Orang	100	46,000,000	200	50,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi					2,848,400,000		2,870,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%	30	2,848,400,000	40	2,870,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.02.01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				443,100,000		370,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	Orang	1400	443,100,000	1400	370,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02. 1.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				2,405,300,000		2,500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	Orang	2600	2,405,300,000	2700	2,500,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						50,000,000		50,000,000		
						Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga	%	35	50,000,000	40	50,000,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						berbasis gender							
		2.08.04. 1.01		Peningkata n Kualitas Keluarga dalam Mewujudka n Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenanga n Provinsi					50,000,0 00		50,000,00 0		
						Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%	40	50,000,0 00	50	50,000,00 0	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUA N	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.04.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	50,000,000	2	50,000,000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dan lintas Kab/Kota							
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak								1,716,800,000		1,874,000,000		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8.05	1,716,800,000	8.02	1,874,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1,021,800,000		1,095,000,000		
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	15	300,000,000	20	350,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					300,000,000		350,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	10	300,000,000	20	350,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.03.1.03.04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah				300,000,000		350,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kabupaten/Kota								
						Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Orang	30	300,000,000	35	350,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5.7	721,800,000	5.64	745,000,000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					155,000,000		170,000,000		
						Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	8.3333	155,000,000	13.889	170,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				40,000,000		50,000,000		
						Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi	Orang	35	40,000,000	35	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.03.1.01.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				115,000,000		120,000,000		
						Jumlah peserta Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Orang	35	115,000,000	35	120,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan					415,000,000		435,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota									
						Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100	415,000,000	100	435,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan				200,000,000		220,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
						Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani bagi perempuan korban kekerasan	%	100	200,000,000	100	220,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.03.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan				215,000,000		215,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kewenangan Provinsi								
						Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	10	215,000,000	10	215,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan					151,800,000		140,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				n Perempuan Kewenangan Provinsi									
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	8	151,800,000	8	140,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kewenangan Provinsi								
						Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	50	50,000,000	50	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.03.1.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan				51,800,000		40,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi								
						Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Orang	100	51,800,000	100	40,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.03.1.03.03			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi								
						Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi	Unit	1	50,000,000	1	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						695,000,000		779,000,000		
						Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan	%	15	50,000,000	20	100,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						pendataan kekerasan anak secara berjejaring							
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					-		50,000,000		
						Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhk	Kelompok	10	-	10	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						an perlindungan khusus							
		2.08.07. 1.02.04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				-		50,000,00 0		
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka perlindungan khusus	Kelompok	10	-	10	50,000,00 0	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						anak							
		2.08.07. 1.03		Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerluka n Perlindunga n Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					50,000,0 00		50,000,00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	10	50,000,000	15	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.07.1.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi								
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	50,000,000	1	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
							Per 100.000	12.46	645,000,000	12.36	679,000,000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												n Anak	
		2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					90,000,000		100,000,000		
						Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	8.3333	90,000,000	13.889	100,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.07.1.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap	Kegiatan	2	50,000,000	2	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						anak kewenangan Provinsi							
		2.08.07.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				40,000,000		50,000,000		
						Jumlah rakor pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	2	40,000,000	2	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerluka					426,600,000		489,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				n Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100	426,600,000	100	489,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.02.01			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				200,000,000		224,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	%	100	200,000,000	100	224,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.07.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				215,000,000		215,000,000		
						Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan	Kegiatan	2	215,000,000	2	215,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						n perlindungan khusus kewenangan Provinsi							
		2.08.07.1.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				11,600,000		50,000,000		
						Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Kegiatan	2	11,600,000	2	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					128,400,000		90,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	128,400,000	15	90,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan				88,400,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Khusus Kewenangan Provinsi								
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2	88,400,000	2	50,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.08.07.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga				40,000,000		40,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi								
						Jumlah pelatihan bagi penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	2	40,000,000	2	40,000,000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas									1,765,000,000		1,815,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2.2		2.19		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana								1,425,000,000		1,465,000,000		
						Angka pemakaian kontrasepsi /CPR	%	64.76	1,425,000,000	65.17	1,465,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDA LIAN PENDUDUK						275,000,0 000		315,000,0 00		
						Persentase kabupaten/ kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	25	50,000,0 00	35	50,000,00 0	Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.14.02. 1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalia n Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					50,000,0 00		50,000,00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	7	50,000,000	10	50,000,000	SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.14.02.1.02.06			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Profil Kependudu kan, Keluarga Berencana dan Pembangun an Keluarga	Doku men	1	50,000,0 00	1	50,000,00 0	SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangun an Kependudu kan) 5 Bidang	%	19.44	225,000, 000	27.7	265,000,0 00	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Sejahtera	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					225,000,000		265,000,000		
						Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kabupaten/Kota	7	225,000,000	10	265,000,000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.01			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana				75,000,000		75,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)								
						Jumlah Peserta Workshop GDPK	Orang	35	75,000,000	50	75,000,000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.14.02.1.01.02			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				100,000,000		140,000,000		
						Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan GDPK	Dokumen	1	100,000,000	1	140,000,000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.14.02.1.01.07			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah peserta Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan dan Fasilitasi Pembentukan SSK	Orang	35	50,000,000	35	50,000,000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						(Sekolah Siaga Kependudukan)							
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						1,150,000,000		1,150,000,000		
						Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	29.5	1,100,000,000	30	1,100,000,000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
		2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan					1,100,000,000		1,100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
						Jumlah peserta KB Aktif	Orang	8E+06	1,100,000,000	1E+07	1,100,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	
		2.14.03.1.01.04			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja				400,000,000		400,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta penggerak dan advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mitra Kerja	Orang	980	400,000,000	1100	400,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.14.03.1.01.07			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				700,000,000		700,000,000		
						Jumlah peserta Promosi dan Konseling Kesehatan	Orang	37000	700,000,000	40000	700,000,000	SEKSI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal						DAN EDUKASI	
						Unmeetneed KB	%	12.89	50,000,000	12.76	50,000,000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
		2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan					50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pembinaan Kesertaan Ber- KB									
						Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%	11.7	50,000,000	17.5	50,000,000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.02.02			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah PPKBD yang berperan serta aktif dalam pembinaan kesertaan ber-KB	Orang	1500	50,000,000	1600	50,000,000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga								340,000,000		350,000,000		
						Indeks pembangunan keluarga	Angka	54.38	340,000,000	56.29	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDA YAAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTER A (KS)						340,000, 000		350,000,0 00		
						Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96.25	150,000, 000	96.3	150,000,0 00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					150,000, 000		150,000,0 00		
						Jumlah kelompok tribina yang	Kelompok	2676 5	150,000, 000	2677 9	150,000,0 00	SEKSI KELUARGA SEJAHTER	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						aktif						A	
		2.14.04. 1.01.05			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				150,000,000		150,000,000		
						Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Orang	200	150,000,000	250	150,000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	25	40,000,000	30	50,000,000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					40,000,000		50,000,000		
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	30	40,000,000	35	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.14.04.1.02.04			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				40,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	Kelompok	30	40,000,000	35	50,000,000	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	90.5	150,000,000	91	150,000,000	Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah					150,000,000		150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
						Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	15439	150,000,000	15456	150,000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.02			Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				150,000,000		150,000,000		
						Jumlah peserta Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Orang	200	150,000,000	250	150,000,000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									11.865.097.000		13.572.538.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		85		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja								396,138,000		424,538,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	perangkat daerah												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79.05	396,138,000	79.1	424,538,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						396,138,000		424,538,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	396,138,000	100	424,538,000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01 .1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					396,138,000		424,538,000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	1	396,138,000	1	424,538,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01 .1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				196,138,000		224,538,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	196,138,000	1	224,538,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													SEMARANG
		X.XX.01 .1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200,000,000		200,000,000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								##### ####		##### ####		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80	##### ####	85	##### ####	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI						##### ####		##### ####		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	90	##### ####	90	##### ####	SEKRETARI AT	
		X.XX.01 .1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,938,49 7,000		##### ####		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi	Laporan	1	8,938,49 7,000	1	##### ####	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						i keuangan Perangkat Daerah							
		X.XX.01 .1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8,508,49 7,000		9,950,000, 000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	8,508,49 7,000	12	9,950,000, 000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				330,000, 000		330,000,0 00		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung	Bulan	12	330,000, 000	12	330,000,0 00	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						pelaksanaan tugas ASN							
		X.XX.01 .1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	3	50,000,000	3	50,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25,000,000		25,000,000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi	Dokumen	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						perangkat Daerah							
		X.XX.01 .1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25,000,000		25,000,000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	4	25,000,000	4	25,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60,000,000		60,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	60,000,000	2	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01 .1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60,000,000		60,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20,000,000		80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	20,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01 .1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		40,000,000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	100	-	100	40,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		10,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	-	12	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10,000,000		10,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Wo rkshop/ Seminar	Orang	25	10,000,000	25	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		10,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	30	-	30	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10,000,000		10,000,000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	100	10,000,000	100	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					536,462,000		588,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi	Laporan	1	536,462,000	1	588,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						i umum Perangkat Daerah							
		X.XX.01 .1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000		10,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	12	10,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120,000,000		120,000,000		
					Jumlah unit penyediaan		Unit	10	60,000,000	10	60,000,000	SUB BAGIAN	OPD Provinsi ;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Peralatan Kantor			00		0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	60,000,000	1	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20,000,000		20,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20,000,000	12	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108,462,000		125,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya	Bulan	12	108,462,000	12	125,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN	OPD Provinsi ; OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						a kebutuhan logistik kantor						KEPEGAWAIAN	Provinsi
		X.XX.01 .1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20,000,000		30,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				150,000,000		175,000,000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan	Bulan	12	150,000,000	12	175,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						bahan bacaan/buku perpustakaan PD							
		X.XX.01 .1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,000,000		100,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01 .1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8,000,000		8,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhiny a penatausah aan arsip	Bulan	12	8,000,00 0	12	8,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
		X.XX.01 .1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25,000,0 00		65,000,00 0		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapora n	2	25,000,0 00	2	65,000,00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
		X.XX.01 .1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				-		20,000,00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Dinas Jabatan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	5	-	1	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.07.05			Pengadaan Mebel				-		10,000,000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	4	-	4	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		10,000,000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	10	-	10	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01 .1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25,000,000		25,000,000		
					Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya		Unit	0	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,507,000,000		1,555,000,000		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	1	1,507,000,000	1	1,555,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01 .1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000		5,000,000		
					Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD		Bulan	12	5,000,000	12	5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500,000,000		500,000,000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD		Bulan	12	500,000,000	12	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,002,000,000		1,050,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1,002,000,000	12	1,050,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					382,000,000		420,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	382,000,000	2	420,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01 .1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		10,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	-	12	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan				147,000,000		150,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	147,000,000	12	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10,000,000		10,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01 .1.09.09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				140,000,000		160,000,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	140,000,000	1	160,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01 .1.09.10			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60,000,000		60,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung	Bulan	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						gedung kantor							
		X.XX.01 .1.09.11			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25,000,000		30,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dalam pelaksanaannya. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renja dilakukan melalui proses panjang mulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, Penyempurnaan Rancangan Renja telah melibatkan penjangkauan aspirasi dan identifikasi permasalahan baik melalui Forum Perangkat Daerah maupun mekanisme lainnya, serta verifikasi maupun pendampingan penyempurnaan rancangan Renja oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 sebelum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya tahap akhir adalah Penetapan Renja.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2022 yaitu “Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, didukung penguatan daya saing ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM)”.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, etos kerja serta semangat gotong-royong seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.